

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa semakin berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi yang ada semakin mempengaruhi komunikasi massa khususnya media massa. Tidak ada satu pun manusia yang bisa hidup tanpa mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Manusia tidak bisa berhenti mendapatkan informasi melalui berita. Berita bisa disajikan kepada khalayak melalui media cetak maupun elektronik.

Salah satu topik berita yang tidak habis-habisnya diberitakan di media Indonesia akhir-akhir ini adalah masalah korupsi yang mendapat banyak perhatian dari media massa baik cetak maupun elektronik. *The Founding Fathers House* (FFH) dalam risetnya pada 12 media cetak, 6 televisi dan 7 media *online* di Indonesia selama satu tahun dari Oktober 2011 hingga Oktober 2012 menemukan bahwa 7 dari 10 berita berfrekuensi tinggi adalah tentang kasus suap dan korupsi (Antara News, 24 Oktober 2012 dalam Christiany Juditha, 2013).

Korupsi di Indonesia sendiri semakin merajalela. Berbagai macam kasus korupsi terjadi dari mulai kasus yang besar, sedang, hingga kasus korupsi yang kecil dari tahun ke tahun tanpa bisa dihentikan. Para pejabat kita tidak ada kapoknya melakukan korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) semakin disibukkan dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.



Gambar 1.1 Statistik Korupsi Indonesia di ASEAN

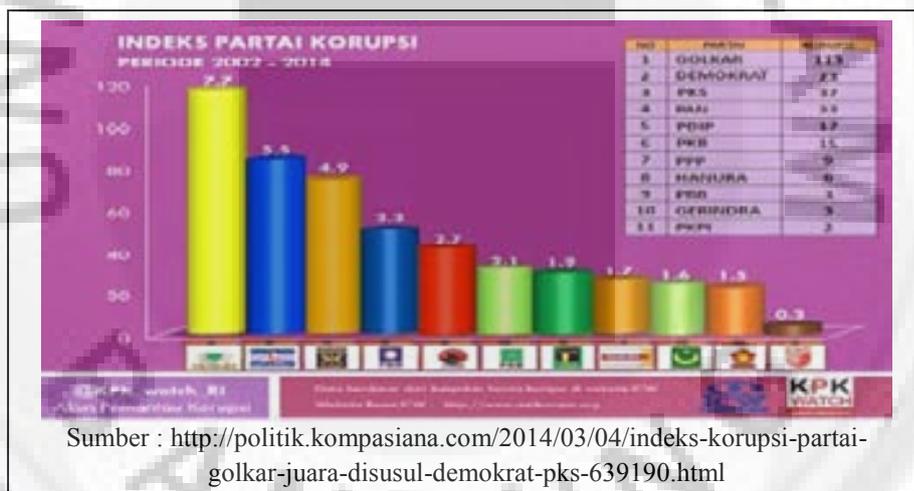
Statistik diatas menunjukkan korupsi di Indonesia sudah ada pada level yang sangat membahayakan. Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara terkorupsi di ASEAN. Hal ini jelas mencoreng muka Indonesia di hadapan negara lain. Hukuman yang diberikan kepada para koruptor juga dianggap masih ringan yang menyebabkan mereka tidak jera. Negara lagi-lagi yang menanggung kerugian mulai dari ratusan juta, milyaran hingga triliyunan rupiah.

Selain itu, kasus korupsi di Indonesia telah menjerat berbagai macam instansi mulai dari DPR, kepolisian, TNI, Menteri, Kejaksaan, Partai Politik dan masih banyak lagi. Bahkan kementerian Agama pun tak luput dari korupsi pengadaan Al-Qur'an. Beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian antara lain, kasus korupsi Bank Century yang menyeret Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani.

Kasus korupsi lain datang dari Partai Demokrat yang menyeret kader-kadernya. Setelah Nazaruddin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Kasus Hambalang ini juga menyeret Mindo Rosalina Manulang,

Angelina Sondakh, hingga menyeret “gegeduk” Partai Demokrat Andi Malarangeng dan terakhir menyeret Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pihak-pihak terkait dalam kemenangan tender.

Selain Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut masuk ke lubang korupsi. Dengan tertangkapnya Presiden PKS Lufti Hassan oleh KPK dalam kasus impor daging sapi sempat menjadi isu terpanas dan paling banyak dibicarakan. Kejadian ini praktis mencoreng citra PKS sebagai partai berbasis agama yang dicitrakan sebagai partai bersih.



Gambar 1.2 Indeks Korupsi Partai Politik Periode 2002-2014

Indeks diatas menunjukkan partai-partai politik yang terindikasi korupsi dari tahun 2002 sampai 2014. Masing-masing dari anggota partai mereka terindikasi korupsi hingga tahun 2013. Pada tahun 2014, tercatat bahwa Golkar menempati urutan pertama yang disusul oleh Demokrat dan PKS diurutan ke 3.

Setelah partai politik, sejumlah elit di Kepolisian pun tak luput dari tindakan korupsi. Salah satunya Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang melakukan korupsi proyek pengadaan alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri tahun 2011. Negara diduga mengalami Proyek Simulator SIM ini senilai Rp 196,8 miliar. Kasus ini membuat negara rugi sekitar Rp 100 miliar.

Tidak hanya pejabat di daerah perkotaan saja, tapi pejabat daerah pun tidak luput dari tindakan korupsi. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Aradila Caesar menyatakan, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, Kotamadya, maupun Provinsi.

Berdasarkan pemantauan ICW di semester pertama tahun 2012, sebanyak 48 terdakwa dan pada semester pertama tahun 2013 sebanyak 60 terdakwa. Sebanyak 101 pejabat daerah yang didakwa melakukan korupsi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Arad mengatakan, jumlah koruptor dari kalangan pejabat daerah tersebut meningkat dibandingkan semester pertama sejak dua tahun sebelumnya. (<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/03/16302581/ICW.Mayoritas.Pelaku.Korupsi.dari.Pejabat.Daerah.Merata.di.Seluruh.Indonesia>, diakses pada 5 Agustus 2014).

Salah satunya adalah kasus korupsi yang menimpa Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada disangka sebagai otak kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, hakim yang menangani perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudhi Tedjocahjono ditangkap Komisi

Pemberantas Korupsi setelah menerima suap Rp 125 juta di ruang kerjanya. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Herry Nurhayat, Toto Hutagalung, dan Asep Triana, ikut ditangkap.

Penyidik menyimpulkan Dada Rosada selaku Mantan Wali Kota Bandung diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor menyebut, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp. 750 juta (Pikiran Rakyat, 2 Juli 2013).

Media massa seharusnya menjadi pengawas yang mempunyai tugas untuk menyiarkan berita, dan memberikan fakta-fakta yang ada agar diketahui masyarakat. Pemberitaan pada media massa tidak terlepas dari subjektivitas atau tidak objektif. Idealnya berita yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi (objektif).

Menurut William S. Maulsby berita didefinisikan sebagai : “suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, serta dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Gambar sederhananya, seperti dilukiskan para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi” (dalam Suryawati, 2011: 68).

Berita-berita hukum secara relatif mengisi lembaran depan surat kabar. Berita-berita hukum menjadi berita yang penting, hal ini dikarenakan berita hukum mengandung elemen konflik didalamnya.

Berita mengenai laporan hukum menarik karena mengandung elemen konflik dimana ada hak masyarakat umum dan individu di dalamnya. Kasus peradilan koruptor misalnya tidak hanya menarik karena besarnya jumlah uang yang dicuri, tetapi juga prosedur hukum yang ditempuh dan administrasinya. Dari kasus-kasus hukum dan peradilan ini juga sering muncul perbincangan dan polemik di media massa tentang keabsahan produk hukum, penilaian tentang kualifikasi, dedikasi, loyalitas dan komitmen para penegak hukum (Chilton R. Bush dalam Barus, 2010: 43-44).

Tapi yang harus diingat bahwa sebuah berita yang layak untuk dibaca apabila memiliki sifat aktual, akurat, objektif, penting, dan menarik. Untuk mempermudah informasi itu disampaikan, maka digunakanlah sebuah perantara yaitu media massa. Media massa sebagai alat untuk menyebarkan berita bertanggungjawab untuk menyampaikan berita yang baik sesuai dengan ilmu jurnalistik. Berita yang baik adalah berita yang objektif.

Ada sebuah mazhab pemikiran yang menyebutkan objektivitas sebagai teknik untuk melindungi wartawan. Seperti yang disebutkan Gaye Tuchman (dalam Rivers, 1994: 112), melukiskan objektivitas sebagai suatu “ritual strategis” yang melindungi wartawan dari ancaman seperti tuntutan atas fitnahan.

Selain itu, objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh media termasuk surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Di zaman yang semakin berkembang, masyarakat kini tidak banyak memiliki waktu mengecek langsung kebenaran sebuah berita.

Oleh karena itu, objektivitas sangat diperlukan dalam pemberitaan. Menurut Westerthäl (dalam McQuail, 2011: 224), secara garis besar membagi objektivitas menjadi 5 kategori, yaitu:

1. Faktualitas (subkategori faktualitas, kemampuan untuk dicek kembali, dan kegunaan informasi),
2. Nilai informasi (subkategori kepadatan berita, keluasan sudut pandang berita, dan kedalaman isi berita),
3. Akurasi (subkategori verifikasi fakta dan keberadaan keterangan saksi mata),
4. Kelengkapan (subkategori kelengkapan isi berita 5W+1H dan mengandung referensi masa lalu), dan
5. Relevansi (subkategori kelayakan untuk diangkat dan penempatan berita).

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar merupakan surat kabar terbesar dan berkualitas di Indonesia khususnya daerah Jawa Barat yang tetap eksis selama bertahun-tahun hingga saat ini. Kedua surat kabar ini di pilih oleh peneliti karena memiliki massa pembaca sangat besar, yang menjadikan surat kabar ini seperti sebuah bacaan wajib bagi setiap warga Jawa Barat. Selalu memberitakan hal-hal yang aktual dan kejadian-kejadian yang dekat dengan masyarakat Jawa Barat.

Distribusi	Jumlah	
	Pikiran Rakyat	Tribun Jabar
Kota Bandung	83.850	97.730
Kabupaten Bandung	14.000	18.092
Kabupaten Bandung Barat	4.100	13.657
Kota Cimahi	4.300	14.180
Kabupaten Sumedang	5.200	4.279
Kabupaten Garut	5.800	4.409
Kota/Kab. Tasikmalaya	9.100	1.653
Kab. Ciamis	3.500	1.880
Kota Banjar	2.000	-
Kota/Kab. Cirebon	7.900	3.021
Kabupaten Indramayu	2.500	859

Kabupaten Kuningan	2.300	988
Kabupaten Majalengka	2.200	1.248
Kabupaten Subang	5.050	1.523
Kabupaten Purwakarta	3.200	3.318
Kabupaten Karawang	2.300	1.005
Kota/Kab. Bogor	4.350	-
Kota/Kab Bekasi	2.250	-
Kabupaten Cianjur	4.800	2.447
Kot/Kab Sukabumi	6.500	2.480
Total	175.200	181.750

Tabel 1.1 Oplah Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar (*Sumber: Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar*)

Tabel diatas merupakan oplah dari kedua surat kabar lokal Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Dengan tabel diatas membuktikan bahwa kedua surat kabar lokal tersebut tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Kedua surat kabar lokal tersebut menobatkan bahwa mereka merupakan surat kabar lokal no 1 di Jawa Barat. Dilihat dari segi segmentasi pun, surat kabar Pikiran Rakyat memiliki segmentasi masyarakat menengah ke atas dan surat kabar Tribun Jabar memiliki segmentasi pasar masyarakat menengah ke bawah.

Dari profil pembaca, surat kabar Pikiran Rakyat memiliki 36% pembacanya kelas yang memiliki pendidikan universitas dan 54% pembacanya merupakan kelas atas menengah. Untuk surat kabar Tribun Jabar, sebanyak 64,4% pembacanya direktur, manager, dan profesional, 22,4% pembacanya staff pelaksana dan 13,2% mahasiswa maupun ibu rumah tangga. Surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar tetap berusaha mengelola integritas dan konsistensinya dalam menjaga konten agar tetap bisa bertahan sebagai media lokal terbesar di tengah banyaknya bermunculan surat kabar lokal lainnya.

Dalam kasus korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, surat kabar Pikiran Rakyat maupun Tribun Jabar selalu memberitakan perkembangan dari kasus yang menjerat orang nomor 1 di Bandung ini. Kedua surat kabar lokal tersebut mengutamakan kasus korupsi Dada Rosada. Dengan menampilkan setiap beritanya di halaman utama (*headline*) surat kabar sebagai berita wajib yang harus dibaca oleh masyarakat.

Namun ada beberapa pemberitaan yang cenderung terlihat kurang objektif, seperti dalam surat kabar Tribun Jabar saat Dada Rosada dan Edi Siswandi ditetapkan menjadi tersangka (2 Juli 2013). Surat kabar Tribun Jabar lebih memilih judul *Edi Siswandi Jadi Tersangka Suap* dengan sub judul *Dada Siap Bantu KPK*. Dilihat dari judul dan sub judulnya saja kita bisa menilai bahwa jika dilihat dari sisi positif dan negatif, jelas terlihat bahwa yang berada di sisi negatif adalah Edi Siswandi yang menjadi tersangka kasus suap. Sedangkan Dada Rosada berada di sisi positif dengan adanya sub judul yang memaparkan bahwa “Dada Rosada siap bantu KPK” walaupun beliau menjadi tersangka.

Untuk surat kabar Pikiran Rakyat, dalam beberapa pemberitaan mengenai kasus korupsi Dada Rosada terdapat unsur-unsur seperti sedikit membela dengan memasukan berita yang menuliskan bahwa adanya keprihatinan dari beberapa kalangan dengan kasus yang menimpa Wali Kota Aktif Bandung tersebut.

Sementara itu, suasana kerja dan pelayanan di Pemkot Bandung, Selasa, terpantau tetap normal. Meskipun terlontar keprihatinan dari beberapa staf dan pegawai negeri di lingkungan Pemkot Bandung, situasi tetap terlihat seperti biasa (Pikiran Rakyat, 21 Agustus 2013).

Maka dari itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang objektivitas berita korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada pada surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui kualitas pemberitaan khususnya objektivitas dalam berita korupsi yang melibatkan pejabat bahkan mantan orang paling berkuasa di Bandung di kedua surat kabar lokal tersebut yang memiliki keterkaitan geografis.

Selain itu, meski memiliki pembaca yang banyak dan kredibel namun apakah berita korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di kedua surat kabar lokal tersebut cukup objektif? Apakah kedua surat kabar lokal tersebut tetap netral dalam pemberitaannya khususnya untuk kasus korupsi yang menjerat pejabat lokal atau bahkan tidak netral? Karena berita-berita ini tentu memiliki tingkat objektivitas yang berbeda-beda dalam setiap surat kabar. Masing-masing surat kabar memiliki kebijakan redaksional yang berbeda satu sama lain. Memiliki kecenderungan pemberitaan yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda pula. Apalagi yang menjadi pemberitaannya adalah pejabat lokal.

Media massa memiliki peran yang penting dalam pemberitaan kasus korupsi. Memiliki peranan strategis sebagai saluran informasi kasus korupsi yang membelit para pejabat Indonesia dan sering dijadikan corong pemberitaan. Netralitas media diperlukan dalam hal ini namun keberpihakan media massa sulit dihindari, seharusnya media tetap bertanggung jawab sebagai *clearing house* terhadap pemberitaan.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana tingkat objektivitas surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar sebagai surat kabar lokal dalam memberitakan kasus korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana objektivitas berita korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar periode Mei - September 2013? Penelitian ini bertujuan menjelaskan objektivitas berita korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar periode Mei - September 2013.

1.2 Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *“Bagaimanakah objektivitas berita korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar?”*.

1.2.2 Identifikasi Masalah

Pemberitaan ini dikaji dengan Analisis Isi, maka berdasarkan masalah di atas identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek faktualitas?

2. Bagaimana objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek nilai informasi?
3. Bagaimana objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek akurasi?
4. Bagaimana objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek kelengkapan?
5. Bagaimana objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek relevansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencoba menjawab pokok masalah yang diuraikan di atas dengan menganalisis Objektivitas dalam Berita Korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada di surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Yang secara detail sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka tujuannya yakni :

1. Untuk mengetahui objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek faktualitas.

2. Untuk mengetahui objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek nilai informasi.
3. Untuk mengetahui objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek akurasi.
4. Untuk mengetahui objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek kelengkapan.
5. Untuk mengetahui objektivitas dalam pemberitaan korupsi Mantan Wali Kota Dada Rosada dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari aspek relevansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya perkembangan teori-teori media massa, ilmu jurnalistik, dan komunikasi politik dalam hal ini media massa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan komunikasi politik dan representasinya lewat media massa. Tidak hanya itu, penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu jurnalistik khususnya sehingga dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya tentang bagaimana pers menjalankan unsur objektivitas di dalam produk jurnalistiknya,

sekaligus sebagai masukan untuk memperkaya wacana tentang objektivitas dalam kaitannya dengan tanggungjawab dan etika pers.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Aspek praktis penelitian ini adalah temuan penelitian akan memberikan masukan bagi institusi media massa lokal dalam meningkatkan profesionalisme dalam pemberitaan, manajemen isu, dan tidak sekedar melibatkan diri dalam isu-isu sensasional. Hal ini karena media massa semakin memegang peranan penting dalam perkembangan pemberitaan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup dan Pengertian Istilah

1.5.1 Ruang Lingkup

Agar dalam penulisan tidak terjadi salah pengertian, maka penulis melakukan pembatasan masalah sehingga penulisan menjadi lebih terarah dan tepat pada tujuan yang diharapkan.

1. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pemberitaan kasus korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada ditinjau dari objektivitas yang meliputi aspek faktualitas, nilai informasi, akurasi, kelengkapan dan relevansi.
2. Objek penelitian adalah berita korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada secara umum yang terdapat di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar.

3. Edisi yang dijadikan objek penelitian yaitu berita korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada pada bulan Mei sampai September 2013.
4. Surat kabar yang diteliti dibatasi hanya Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar yang eksistensinya telah diakui terlebih dulu oleh masyarakat. Kedua surat kabar tersebut memiliki segmentasi pasar yang berbeda.
5. Objektivitas adalah nilai standar yang harus dimiliki oleh sebuah berita. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah surat kabar telah menerapkan prinsip objektivitas atau belum, peneliti melakukan penelitian mengenai objektivitas di surat kabar lokal yang memiliki keterkaitan secara geografis yaitu surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Untuk mengetahui perbandingan unsur objektivitas pada kedua surat kabar lokal tersebut yang telah diakui eksistensinya dan memiliki segmentasi pasar yang berbeda.
6. Alasan peneliti melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah surat kabar lokal dalam memberitakan pejabat lokal bahkan orang nomor satu di daerahnya tetap objektif atau malah memomorduakan unsur objektivitas tersebut. Apakah media lokal tersebut menginformasikan yang sebenarnya kepada masyarakat atau bahkan ada yang ditutup-tutupi. Memang biasanya media lebih fokus pada kecepatan sehingga kualitas isi berita terabaikan.

1.5.2 Pengertian Istilah

1. Berita adalah laporan hangat mengenai fakta atau pendapat yang mengandung hal yang menarik minat atau penting atau kedua-duanya untuk sejumlah besar pembaca (Charnley dalam Sobur, 1999: 16).

Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik perhatian bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka (Charnley dalam Sobur, 2001: 35).

2. Surat kabar sebagai media cetak adalah suatu penerbitan berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan yang dicetak dan diterbitkan secara bertahap atau periodik dan dijual untuk umum (Assegaff, 1991: 140).

3. *Headline* adalah berita utama atau berita yang dianggap penting dan paling menarik bagi pembaca, ditempatkan di halaman depan surat kabar dengan judul ditampilkan sangat mencolok, berukuran besar atau lebih besar dari judul berita lain, dan dicetak tebal (Romli, 2008: 52).

4. Kasus adalah soal atau perkara atau keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara atau keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, Balai Pustaka).

5. Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya

diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian.

6. Dada Rosada merupakan Mantan Wali Kota Bandung. Dada Rosada disangka sebagai otak kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, hakim yang menangani perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Penyidik menyimpulkan Dada Rosada selaku wali kota bandung diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Pikiran Rakyat, 2 Juli 2013).
7. Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan (Romli, 2008: 73).
8. Obyektivitas sendiri merupakan bentuk khusus dari praktisi media dan juga sikap khusus dari tugas pengumpulan, proses dan penyebaran informasi. Yang utama adalah pengadopsian sebuah posisi tidak dipengaruhi siapapun dan tidak memihak salah satu pihak yang menjadi obyek dalam pemberitaan. Obyektivitas juga mengasumsikan sedikitnya maksud tersembunyi atau melayani sebuah partai politik tertentu. Proses pengamatan dan reporting sebaiknya tidak terkontaminasi oleh unsur

subyektivitas atau tidak terpengaruh oleh realitas yang dilaporkan (McQuails, 2011, 223).

9. Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikasi/penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film dan internet (Suryawati, 2011: 37).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan objektivitas berita. Teori-teori yang digunakan yaitu meliputi, teori tanggung jawab sosial, teori agenda setting, teori kualitas berita, dan tentunya teori objektivitas berita.

1. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari teori pers. Teori ini mengemukakan dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pers yang bertanggung jawab harus ‘memberikan laporan yang utuh, jujur, menyeluruh, dan cerdas atas peristiwa sehari-hari dalam konteks yang bermakna’.

Konsep tanggung jawab media atau *media responsibility* selalu digandengkan dengan sosial, sehingga menjadi *social responsibility* media, khususnya yang telah melahirkan empat sistem pers, *Four Theories of the Press*

yang dikembangkan Siebert, Peterson, dan Schramm. Pertanggungjawaban sosial teori menurut Septiawan Santana K. (2005: 225) tertuju pada “berbagai bentuk prosedur demokratis” yang harus diikuti pers.

Teori ini meminta “kebebasan” pers dibatasi dengan faktor “kewajiban” terhadap masyarakat. Kewajiban pers ini memenuhi tuntutan nilai demokrasi: sebagai penyalur informasi, sarana penyampai berbagai pandangan yang berbeda, batas-batas kemandirian yang diperlukan, konsistensi pelaksanaan fungsi-fungsi jurnalistik (seperti edukasi, pengetahuan, pembimbing, dan sebagainya), serta ukuran standar yang harus menjadi pedoman pers.

Ada beberapa prinsip utama dari teori tanggung jawab sosial, yaitu:

1. Media seyogianya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat;
2. Menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketetapan, objektivitas, dan keseimbangan;
3. Media seyogianya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada;
4. Media seyogianya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama;
5. Media secara keseluruhan bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab;
6. Masyarakat dan publik memiliki hak dalam mengharap standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum;
7. Wartawan dan media profesional seyogianya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar (Arifin, 2011: 65).

Pada hakikatnya teori ini masih berada dalam kerangka libertarian. Pers memang diberikan kebebasan namun dalam menjalankannya pers harus memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Melindungi masyarakat dari pemberitaan yang dapat merusak moral masyarakat. Teori tanggung jawab sosial merupakan

perkembangan dari teori-teori pers sebelumnya dengan maksud bahwa pers diharapkan dapat lebih bersifat objektif dalam pemberitaannya

Di Indonesia sendiri, teori ini dikembangkan dalam kerangka Sistem Pers Pancasila yang menempatkan kebebasan dan tanggung jawab secara seimbang. Menurut Arifin dalam bukunya *Sistem Komunikasi Indonesia* (2011: 65), sistem dan teori ini mengawinkan tiga prinsip yang berbeda yaitu: prinsip kebebasan dan pilihan individu; prinsip kebebasan media; dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat.

Teori dan sistem Pers Tanggung Jawab Sosial ini melahirkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar wartawan dan pers bertanggung jawab terhadap masyarakat. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tanpa diputarbalik atau dihilangkan. Teori dan sistem ini dapat disebut sebagai bentuk kebebasan untuk kemaslahatan masyarakat yang dikenal dengan kebebasan positif (*positive freedom*).

Alasan digunakannya teori ini karena adanya keterkaitan antara persoalan objektivitas, kebebasan dengan tanggung jawab yang diemban pers. Wartawan memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan jurnalistik seluas-luasnya dalam menulis sebuah berita. Tetapi wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk tetap berada di dalam koridor profesinya. Wartawan harus objektif dalam setiap pemberitaan. Pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi komunikasi massa di dalam masyarakat.

Di dalam penelitian ini, surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar sebagai media cetak lokal khususnya di daerah Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan berita yang objektif sekalipun beritanya mengenai pejabat lokal bahkan seorang pemimpin daerah yang memiliki keterkaitan secara geografis. Masyarakat memiliki hak untuk menerima informasi berupa berita yang layak atau yang benar tanpa ada bias.

2. Teori *Agenda Setting*

Istilah *agenda-setting* diciptakan oleh McCombs dan Shaw (1972, 1993) untuk menggambarkan fenomena yang telah lama diketahui dan diteliti dalam konteks kampanye pemilu.

McCombs dan Shaw menyatakan bahwa : Media massa memiliki kemampuan memindahkan hal-hal penting dari agenda berita mereka menjadi agenda publik. Kita menilai penting apa saja yang dinilai penting oleh media. Secara singkat teori ini mengatakan bahwa media massa mengarahkan khalayak kepada pemberitaan apa saja yang harus diikuti. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat mengikutinya (Nurudin, 2007: 195).

Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda (Tamburaka, 2012: 23) yaitu:

1. Masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu; dan
2. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain.

Media memberikan perhatian yang berbeda pada setiap isu. Dari berbagai isu yang muncul, ada isu yang diberitakan dengan porsi besar, dan ada pula dengan porsi yang kecil. Isu yang diberitakan dengan porsi yang besar akan dinilai sebagai isu yang penting oleh masyarakat. Media massa telah menetapkan agenda tertentu yang dianggap penting oleh media itu sendiri. Isu yang dianggap penting atau besar bukan terletak pada kenyataan bahwa isu tersebut memang besar, tetapi lebih karena media kerap memberitakan isu tersebut. Dengan kata lain, Agenda Setting berupaya untuk menunjukkan isu-isu dan image yang penting dan menonjol ke dalam pikiran masyarakat.

Media memberikan pengaruh terhadap masyarakat apalagi banyak informasi yang diperoleh dari media. Masyarakat tidak mengecek kebenaran dari suatu informasi menelan begitu saja apa yang disampaikan oleh media. Semakin besarnya terpaan informasi membuat media harus peka akan pentingnya objektivitas dalam berita. Serta menjadi tanggung jawab pers untuk menyampaikan informasi sebenar-benarnya.

Alasan digunakannya teori ini dalam penelitian adalah peneliti mengamati bahwa surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar sebagai media lokal menjadikan berita mengenai korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai *headline* dalam beberapa bulan. Ditambah yang menjadi objek pemberitaan adalah pejabat lokal daerah yang memiliki keterkaitan. Kedua surat kabar lokal tersebut selalu memberikan kabar mengenai perkembangan kasus yang menyangkut mantan orang nomor 1 di Bandung. Media mengagendakan

sesuatu yang menjadi pembicaraan di masyarakat karena memang tugas mereka adalah menjual berita tersebut.

Surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar mengagendakan berita ini menjadi berita yang layak untuk diikuti khususnya untuk masyarakat Jawa barat. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar menjadikan berita ini sebagai berita yang penting bagi khalayak. Surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar harus tetap memperhatikan unsur objektivitas dalam pemberitaan yang dilakukannya apalagi yang menjadi objek pemberitaannya adalah pejabat setempat. Berita yang objektif adalah berita yang mutlak dibutuhkan khalayak. Berita utama memiliki efek agenda-setting yang lebih besar dibandingkan dengan berita lainnya.

3. Teori Kualitas Berita

Suatu berita haruslah memiliki kualitas dengan memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat kualitas sebuah berita agar layak untuk diberikan kepada masyarakat. Masyarakat layak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya atau layak mengenai suatu peristiwa tanpa ada bias. Dengan perkembangan teknologi dan informasi tentunya media khususnya surat kabar dapat meningkatkan kualitas berita dalam setiap penerbitannya.

Mitchel V. Charnley dalam bukunya “Reporting” (1965: 25-39, dalam Agusta 2005: 34), menyebutkan ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikan berita itu berkualitas, yaitu :

1. *News is Accurate* (Berita itu harus akurat dan tepat); “Ketelitian fakta berarti bahwa setiap pernyataan dalam berita, nama orang dan hari, tanggal, bulan, tahun peristiwa, usia, kutipan, kalimat definitif atau setiap kata dan ekspresi harus tepat dan tanpa keraguan, penyajian dari fakta yang dapat dibuktikan. Selain itu, berarti tidak hanya ketepatan secara rinci tetapi juga ketepatan dari kesan keseluruhan dengan secara merinci, mengumpulkan dan memberi tekanan”
2. *News is Balanced* (Berita itu harus seimbang); “... To be fair to it’s audience, news is must have balanced ; balanced is the matter of emphasis and completeness. As the reader’s or listener’s representative, the reporter must constantly strive to give each fact, and to establish it’s relative importance to the meaning of a story as a whole”. (“... Untuk jujur pada pembaca, berita harus seimbang ; seimbang adalah masalah penekanan dan kelengkapan. Sebagai wakil dari pembaca, wartawan harus terus berusaha memberi setiap fakta dengan tekanan yang tepat, meletakkannya dalam hubungan yang tepat dengan fakta yang lain, dan menyusunnya secara berhubungan untuk memberi arti berita secara keseluruhan”)
3. *News is Objective* (Berita itu harus objektif); Maksud dari objektif disini adalah berita itu harus ditulis apa adanya, artinya reporter dalam memilih dan menyusun berita tidak memasukan prasangka-prasangka pribadinya atau pun dari pihak lain”.
4. *News is Concise and Clear* (Berita itu harus singkat dan jelas); “Penyajian berita pada hakikatnya harus sejalan dengan bentuk berita. Berita harus merupakan satu kesatuan, singkat, jelas dan terorganisir, atau memiliki dua makna dalam tujuan isinya, tidaklah memiliki sifat dari kualitas berita. Karena itu berita harus disajikan secara singkat dan jelas, ini jelas berkaitan erat dengan pemilihan kata yang tepat, frase yang lugas, atau rangkaian fakta yang menarik, namun tidak memasukan opini pribadi”.
5. *News is Recent* (Berita harus terbaru); “Berita belum lengkap jika unsur waktu tidak dimasukan. Tekanan pada unsur waktu suatu berita sangat penting, karena masyarakat menyadari tentang eksistensi alam yang bersifat sementara ; segala hal selalu berubah, dan pembaca ingin informasi yang terbaru mengenai berita yang berhubungan dengan perubahan tersebut. Karena pembaca selalu menginginkan berita yang baru, maka kebanyakan berita ditandai dengan “hari ini”, atau paling lama “tadi malam” atau “kemarin”. Berita spesifik tentang waktu, kelengkapan pemberitaan tentang masa yang akan datang memperlihatkan bahwa berita tidak hanya baru, tetapi benar-benar fakta terakhir dari suatu berita”.

Berbagai perbedaan yang menyangkut tentang penulisan berita akan memperlihatkan perbedaan kualitas informasi dari setiap surat kabar. Menurut

McQuail, salah satu konsep yang paling dekat untuk melihat kualitas informasi adalah dari segi obyektivitas (McQuail, 2011: 172).

Alasan digunakannya teori ini karena obyektivitas berita merupakan bagian dari kualitas berita. Jika sebuah surat kabar memiliki obyektivitas dalam pemberitaannya otomatis surat kabar tersebut telah memenuhi salah satu unsur kualitas berita. Surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar haruslah bersifat objektif dalam memberitakan kasus korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Walaupun yang menjadi objek pemberitaan adalah orang nomor satu di Bandung tetaplah bersifat objektif. Dengan memiliki nilai obyektivitas maka surat kabar Pikiran Rakyat maupun Tribun Jabar memiliki salah satu unsur kualitas berita tersebut.

6. Teori tentang Obyektivitas

Berita adalah laporan yang berisikan informasi yang terbaru atau aktual, bersifat penting dan menarik perhatian untuk diketahui oleh publik, yang mencerminkan hasil kerja jurnalistik wartawan (bukan opini atau pendapat wartawan). Tidak semua informasi yang tertulis dalam media cetak atau ditayangkan media elektronik disebut sebagai berita. Yang disebut berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa atau fakta.

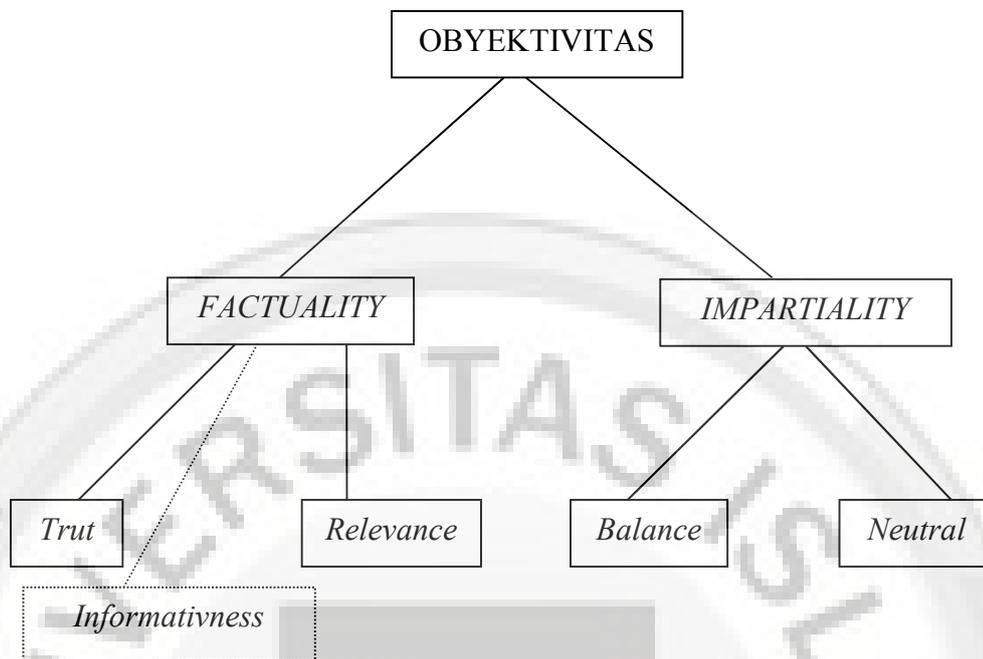
Obyektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya,

sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya (Rachamdi dalam Sumadiria, 2005: 38).

Berbagai perbedaan yang menyangkut tentang penulisan berita akan memperlihatkan perbedaan kualitas informasi dari setiap surat kabar. Menurut McQuail (2011), salah satu konsep yang paling dekat untuk melihat kualitas informasi adalah dari segi obyektivitas.

Obyektivitas sendiri merupakan bentuk khusus dari praktisi media dan juga sikap khusus dari tugas pengumpulan, proses dan penyebaran informasi. Yang utama adalah pengadopsian sebuah posisi tidak dipengaruhi siapapun dan tidak memihak salah satu pihak yang menjadi obyek dalam pemberitaan. Yang kedua adalah mengurangi partisanship, tidak memihak atau tidak menunjukkan bias. Ketiga, obyektivitas menghendaki *strict attachment* agar akurat dan kriteria kebenaran yang lainnya (seperti *relevance* dan *completeness*). Obyektivitas juga mengasumsikan sedikitnya maksud tersembunyi atau melayani sebuah partai politik tertentu. Proses pengamatan dan reporting sebaiknya tidak terkontaminasi oleh unsur subyektivitas atau tidak terpengaruh oleh realitas yang dilaporkan (McQuails, 2011, 222).

Model yang paling mendekati obyektivitas yang ideal adalah model yang dibuat oleh Westersthäl, yang mengadopsi peraturan penyiaran di Swedia, meski menghindari istilah obyektivitas yang menghendaki ketidakberpihakan. McQuail menjabarkan bahwa aspek kognitif berita sangat terkait dengan faktualitas (*factuality*). Faktualitas diartikan sebagai kualitas informasi yang dikandung oleh suatu berita. Faktualitas memiliki tiga aspek utama yaitu *truth* (kebenaran), *informativeness* dan *relevance*.



Bagan 1.2 Model Westerthäl
(Sumber: McQuail, 2011:224)

Dalam penelitian Wasterhāl tahun 1983, aspek evaluatif berkaitan dengan *impartiality* (ketidakberpihakan) (dalam McQuail, 2011: 224). Dalam suatu penelitian yang dimaksud, keberpihakan adalah teks berita secara sistematis yang menonjolkan satu sisi di atas yang lain ketika berkenaan dengan isu kontroversial dengan tujuan mengarahkan pembaca secara konsisten ke arah tertentu.

McQuail membedakan aspek evaluatif menjadi dua, yaitu *balance* dan netralitas. *Balance* berhubungan dengan seleksi atau penghilangan fakta-fakta yang mengandung nilai atau *expression point of view*, sedangkan netralitas berhubungan dengan presentasi fakta itu sendiri. Yang dapat dievaluasi dari penggunaan kata-kata, citra dan *frame of reference* yang bersifat evaluatif dan juga penggunaan gaya presentasi yang berbeda. Meski keduanya sulit dibedakan namun untuk lebih jelas McQuail menambahkan bahwa untuk meneliti *balance* kita perlu mencari denotasi, sedangkan dalam meneliti netralitas kita perlu mencari konotasi (Dewan Pers, dalam Fardiah 2013: 19).

Pada gambar diatas memberikan elemen ekstra, yaitu ‘keadilan informatif’ yang penting bagi makna objektivitas yang lebih utuh. Rujukannya adalah kepada kualitas konten informasi yang mungkin meningkatkan kesempatan untuk mendapat informasi kepada khalayak: diperhatikan, dipahami, diingat, dan sebagainya. Ini adalah sisi pragmatis dari informasi yang sering kali diremehkan atau diabaikan dalam teori normatif, tetapi esensial kepada gagasan yang lebih utuh dari kinerja informasi yang baik.

Westerhāl (dalam McQuail, 2011: 224) mengembangkan konsep objektivitas dengan membaginya ke dalam 5 bagian :

1. Faktualitas

Faktualitas dibagi menjadi tiga yaitu faktualitas, kemampuan untuk dicek kembali (*checkability*), dan kegunaan informasi (*readability*).

2. Nilai Informasi

Nilai Informasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu kepadatan berita (*density*), keluasan sudut pandang berita (*breadth*), dan kedalaman isi berita (*depth*).

3. Akurasi

Akurasi dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi fakta dan keberadaan identitas saksi mata (*eye witness comparisons*).

4. Kelengkapan

Kelengkapan isi berita dibagi menjadi dua bagian yakni, kelengkapan isi berita 5W+1H dan mengandung referensi masa lalu (*reference*).

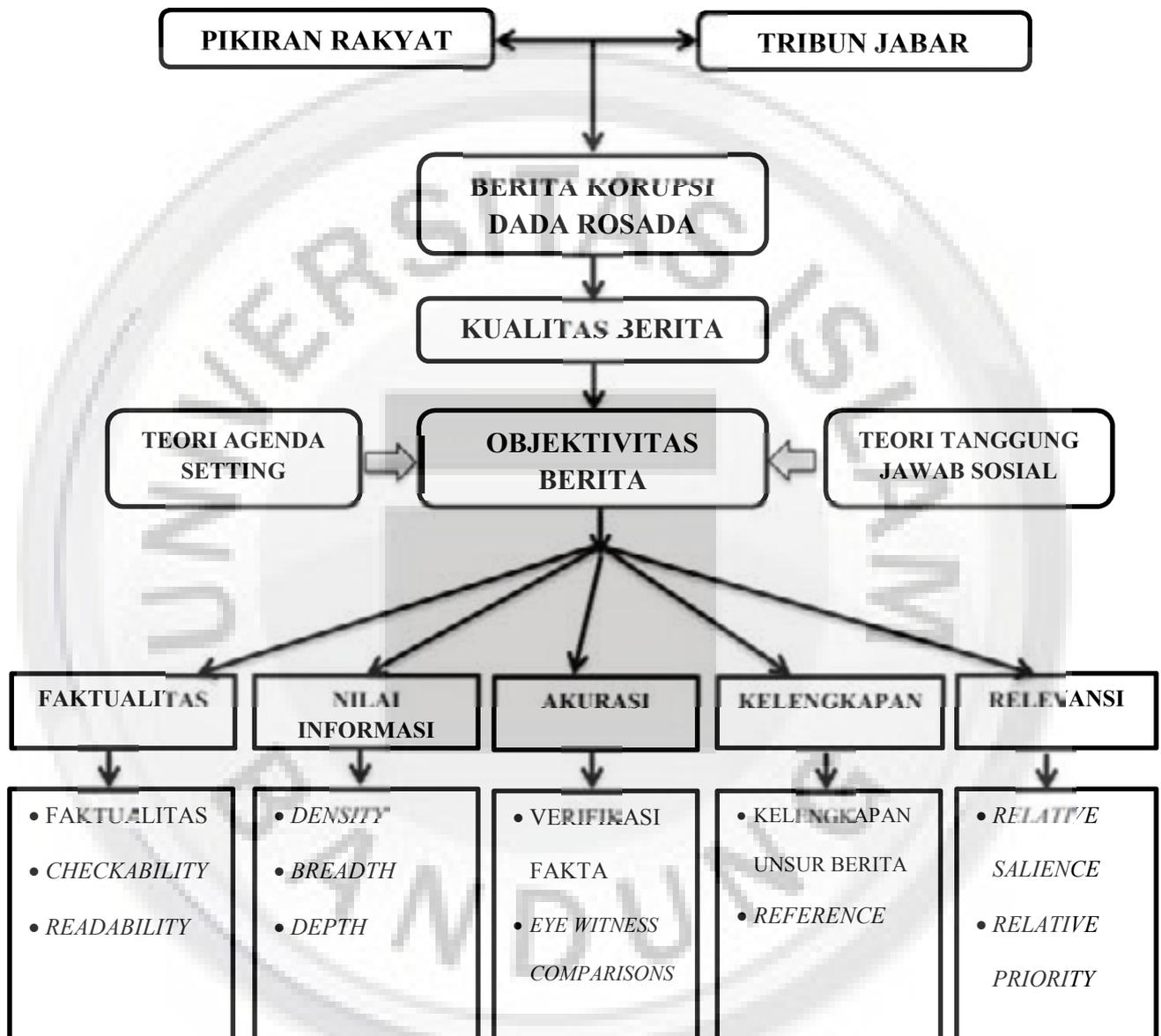
5. Relevansi

Relevansi dibagi menjadi dua yaitu, kelayakan berita untuk diangkat (*relative salience*) dan penempatan berita (*relative priority*)

Masyarakat masih mempercayai apa yang disampaikan oleh media massa, termasuk surat kabar. Maka dari itu, media massa khususnya surat kabar bertanggung jawab untuk menyampaikan berita yang objektif sebagai bentuk loyalitas kepada warga.

Untuk mengetahui kualitas pemberitaan mengenai kasus korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada teori objektivitas digunakan di dalam penelitian ini. Objektivitas merupakan nilai standar yang sudah menjadi harga mati sebuah berita. Media harus tetap menjunjung tinggi objektivitas dalam setiap pemberitaannya untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan lima bagian objektivitas, yaitu faktualitas, nilai informasi, akurasi, kelengkapan dan relevansi.

Untuk memudahkan melihat alur pemikiran penelitian ini, berikut bagan kerangka pemikiran:



Bagan 1.2 Alir Penelitian